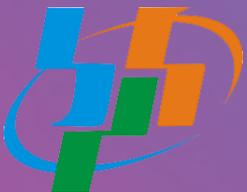


# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PRABUMULIH 2020



<https://prab>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PRABUMULIH**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PRABUMULIH 2020



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PRABUMULIH 2020

## ISSN/ISBN:

**Katalog** : 4102004.1672

**No Publikasi** : 16720.1812

**Ukuran Buku** : 17,6 cm x 25,0 cm

**Jumlah Halaman** : xii+84 halaman

## Penulis:

Arie Feazri

## Penyunting:

Tatang Dwiyatmoko

Lona Nilasari

## Gambar Kulit:

Tatang Dwiyatmoko

## Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

## Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN**  
**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PRABUMULIH 2020**

**Pengarah** : Ahmad Nurhidayat

**Penanggung Jawab** : Tatang Dwiyatmoko

**Penyunting** : 1. Tatang Dwiyatmoko  
2. Lona Nilasari

**Penulis** : Arie Feazri

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

**I**NDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PRABUMULIH 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Prabumulih antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Prabumulih,           Desember 2020  
Kepala BPS Kota Prabumulih

Ahmad Nurhidayat, S.Si

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I ANALISIS KUADRAN.....	1
BAB II KEPENDUDUKAN .....	9
BAB III KESEHATAN .....	17
BAB IV PENDIDIKAN .....	27
BAB V KETENAGAKERJAAN .....	41
BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI .....	51
BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN .....	59
BAB VIII KEMISKINAN .....	69
BAB IX SOSIAL LAINNYA .....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	83

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Prabumulih, 2015-2019.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kota Prabumulih, 2010, 2017, 2018 dan 2019 .....	4
Tabel 1.3	Indikator Demografi Prabumulih, 2015-2019.....	6
Tabel 1.4	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2018 dan 2019.....	8
Tabel 2.1	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2018-2019.....	18
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2018 dan 2019.....	19
Tabel 5.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2018 - 2019.....	47
Tabel 5.2.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut di Kota Prabumulih, 2018 - 2019 .....	48
Tabel 5.3.	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2018-2019.....	49
Tabel 5.4.	Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018-2019.....	51
Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga menurut sumber penerangan utama, Tahun 2018-2019 .....	62
Tabel 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Kota Prabumulih, 2018 dan 2019 .....	64

Tabel 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Provinsi Sumatera Selatan, 2018 dan 2019 .....	64
Tabel 7.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih, 2017-2019 .....	68
Tabel 7.2.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih 2016-2019 .....	69
Tabel 7.3.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama, 2019.....	72

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Prabumulih, 2019 .....	5
Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut kelompok umur, 2019 .....	24
Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah Kota Prabumulih (tahun), 2014-2019	25
Gambar 3.3. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2017-2019.....	26
Gambar 3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Prabumulih Menurut Kelompok Umur, 2015-2019 .....	28
Gambar 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kota Prabumulih-Menurut Jenis Kelamin, 2019.....	29
Gambar 3.6. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Prabumulih Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2019 .....	30
Gambar 3.7. Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun Ajaran 2015 - 2019 .....	32
Gambar 3.8. Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun ajaran 2016-2019 .....	33
Gambar 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kota Prabumulih 2017, 2018, dan 2019 .....	37
Gambar 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Prabumulih, 2017-2019 .....	38
Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kota Prabumulih dan Sumatera Selatan, 2017-2019 .....	39

Gambar 4.4.	Tingkat Pengangguran (Persen) Menurut Jenjang Pendidikan di Prabumulih, 2018-2019 .....	39
Gambar 4.5.	Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan jenis kelamin, 2019 .....	40
Gambar 4.6	Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2018 dan 2019 .....	41
Gambar 4.7	Setengah Pengangguran Prabumulih dan Sumsel, 2018 - 2019 .	42
Gambar 6.1.	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kota Prabumulih, 2017—2019 .....	58
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Prabumulih, Tahun 2019 .....	59
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2019 .....	63
Gambar 7.1.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2019 .....	71
Gambar 8.1.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, 2018-2019 .....	76
Gambar 8.2.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan .	77

# 1

## ANALISIS KUADRAN



Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih berada pada Kategori Tinggi (nilai IPM 74,81) dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Sumatera Selatan (Nilai IPM 70,02)

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2019

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

# BAB I

## ANALISIS KUADRAN

Pembangunan menurut KBBI diartikan sebagai suatu proses untuk membangun, yaitu ikhtiar untuk mengubah keadaan dunia masa lampau yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia lahir maupun batin dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang membahagiakan bagi generasi yang akan datang. Capaian suatu pembangunan dapat diukur dengan menggunakan analisis kuadran.

Untuk melihat capaian pembangunan Kota Prabumulih dan melihat posisinya dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan digunakan analisis kuadran dengan nilai rata-rata kabupaten/kota sebagai dasar pengelompokan wilayah kabupaten/kota. Adapun data yang digunakan adalah data tahun 2019 dengan variabel yang akan dianalisis sebagai berikut:

- (i) Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan
- (ii) Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran
- (iii) Tingkat kemiskinan dan Rasio Ketimpangan (Gini Ratio)
- (iv) Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

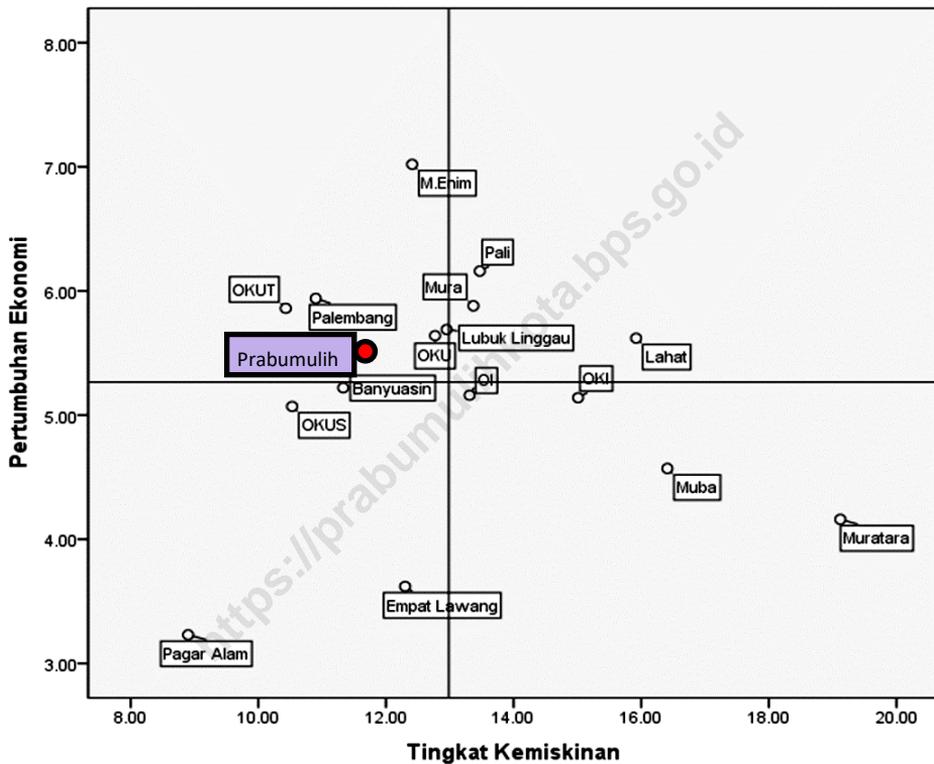
### **Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Untuk melihat pengelompokan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan angka Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan digunakan diagram kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran.

- Kuadran 1 merupakan wilayah dengan nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah.
- Kuadran II merupakan wilayah dengan nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan tinggi.
- Kuadran III merupakan wilayah dengan nilai pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan rendah.

- Kuadran IV merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan tinggi .

**Gambar 1.1 Analisis kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2019**



Sumber: PDRB dan Susenas, 2019

Berdasarkan analisis kuadran Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan dengan menggunakan Diagram Kartesius, diketahui bahwa Kota Prabumulih berada pada **Kuadran I** yaitu nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah.

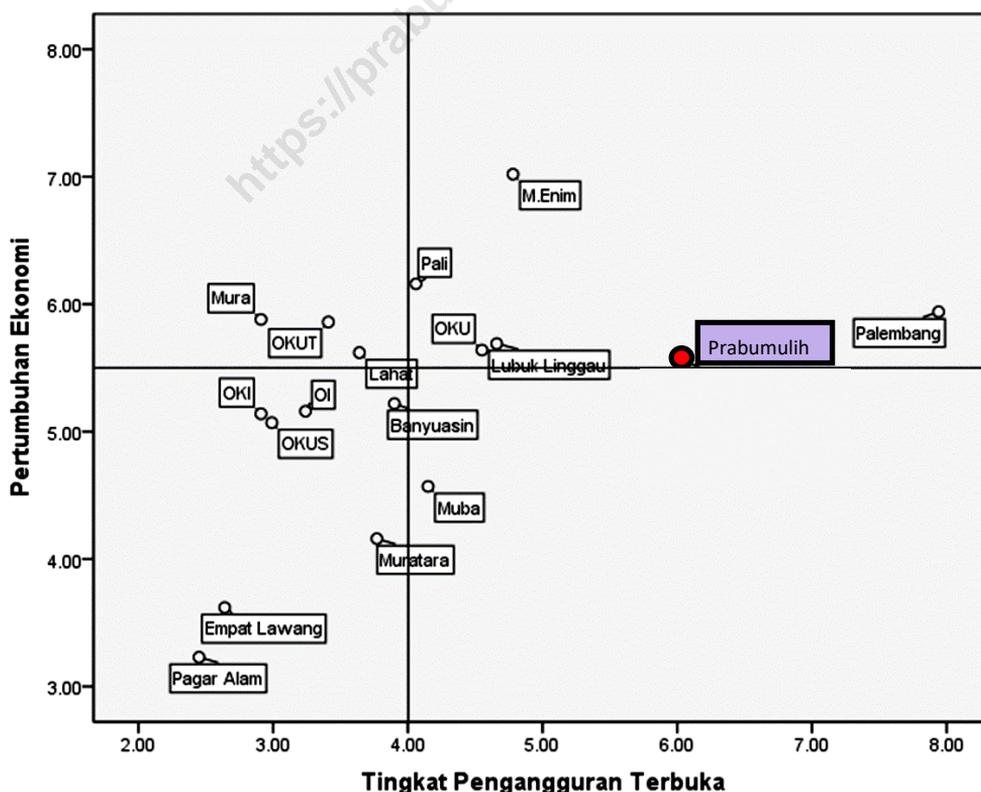
### Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan

penduduk bisa memperluas pasar domestik. Pengelompokan kabupaten/kota di Sumatera selatan dengan analisis kuadran pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

- Kuadran 1 merupakan wilayah dengan nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rendah.
- Kuadran II merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan TPT tinggi.
- Kuadran III merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan TPT rendah.
- Kuadran IV merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan TPT tinggi.

**Gambar 1.2 Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di , 2019**



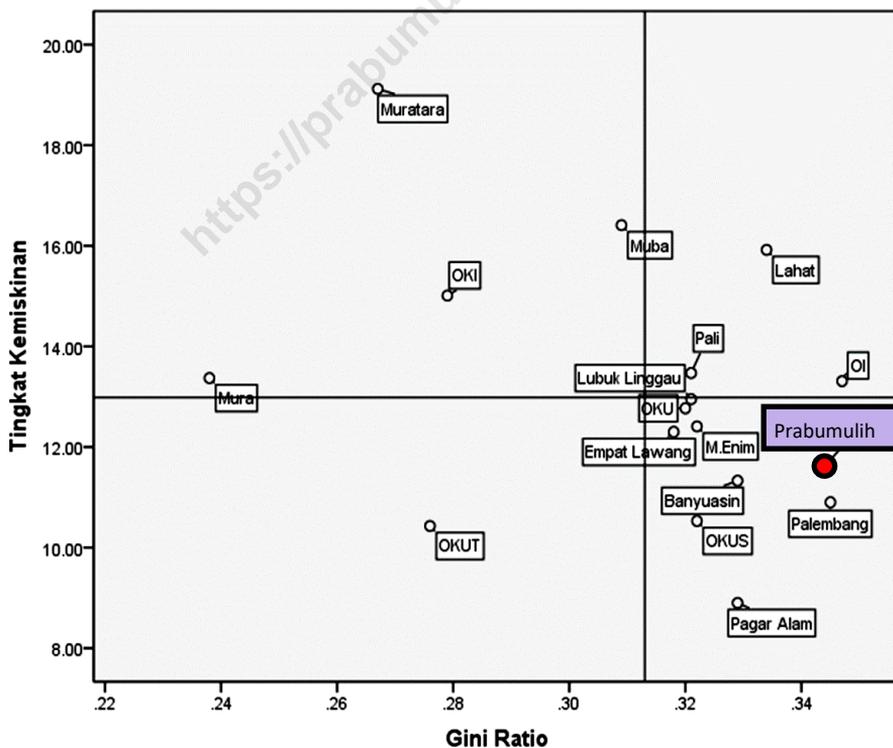
Sumber: PDRB dan Sakernas, 2019

Berdasarkan analisis kuadran Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran diketahui bahwa Kota Prabumulih berada pada **Kuadran II** yaitu nilai pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran tinggi.

### Tingkat Kemiskinan dan Rasio Ketimpangan

Untuk melihat pengelompokan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan digunakan Diagram Kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran, yaitu :

**Gambar 1.3 Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2019**



Sumber: Susenas, 2019

- Kuadran I yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai kemiskinan tinggi dan ketimpangan rendah.
- Kuadran II yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai kemiskinan tinggi dan ketimpangan tinggi.
- Kuadran III yaitu kelompok kabupaten/kota dengan kemiskinan rendah dan ketimpangan rendah.
- Kuadran IV yaitu kelompok kabupaten/kota dengan kemiskinan rendah dan ketimpangan tinggi.

Berdasarkan analisis kuadran Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran diketahui bahwa Kota Prabumulih berada pada **Kuadran IV** yaitu persentase kemiskinan rendah dan tingkat ketimpangan tinggi.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

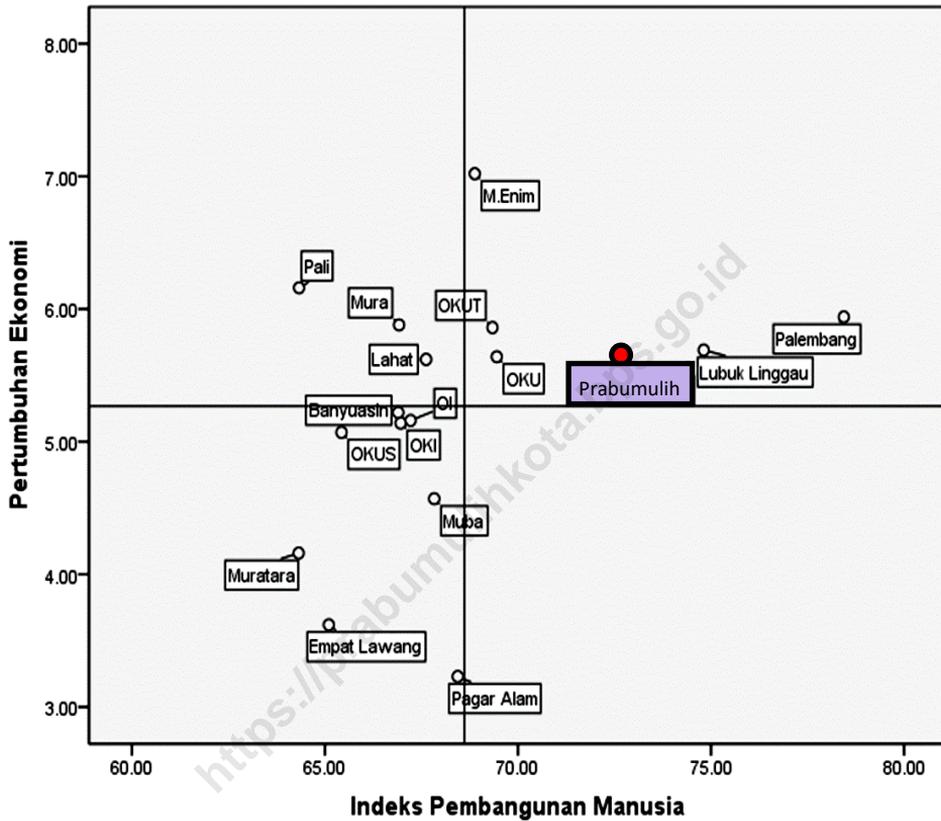
Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkualitas akan menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1996).

Sumber: Susenás, 2019

Untuk melihat pengelompokan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM digunakan diagram kartesius yang membedakan wilayah kabupaten/kota dalam empat kuadran., yaitu :

- Kuadran I yaitu kelompok kabupaten/kota dengan nilai Pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah.
- Kuadran II adalah wilayah yang masuk kelompok pertumbuhan ekonomi tinggi dengan IPM yang juga tinggi.
- Kuadran III merupakan kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM rendah.
- Kuadran IV merupakan kelompok kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM yang tinggi.

**Gambar 1.4 Analisis Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan IPM  
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2019**



Sumber: PDRB dan IPM, 2019

Berdasarkan analisis kuadran Pertumbuhan ekonomi dan IPM diketahui bahwa Kota Prabumulih berada pada **Kuadran II** yaitu Pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM tinggi.

# 2

## KEPENDUDUKAN

Komposisi Penduduk Kota Prabumulih, 2019 (Persen)

28,65 Persen

0-14 Tahun

1,92 Persen

65 +Tahun

69,43 Persen

15-64 Tahun

Sebagian besar penduduk Kota Prabumulih adalah penduduk usia produktif. Dimana setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 48 penduduk tidak produktif

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## BAB II

# KEPENDUDUKAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar tanpa pengendalian yang tepat dapat menyebabkan masalah kesejahteraan penduduk.

Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang besar berarti lebih banyak kebutuhan akan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat tercukupi.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah seharusnya tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu agenda pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 adalah peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan melalui keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi. Walaupun sudah ditekan, secara kuantitas peningkatan jumlah penduduk masih cukup besar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dari Kota Prabumulih di tahun berikutnya.

Jumlah penduduk Kota Prabumulih tahun 2019 sebanyak 186.834 orang. Dari periode waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 telah terjadi

penambahan jumlah penduduk sebanyak 5,17 persen atau 9.756 orang. Namun jika dilihat setiap tahunnya, pertambahan jumlah penduduk ini justru mengalami penurunan. Tahun 2015 penduduk Kota Prabumulih bertambah 2.601 jiwa, tahun 2016 pertambahannya menyusut hanya sebanyak 2.485 jiwa, kemudian pada tahun 2017 bertambah sebanyak 2.565 jiwa, tahun 2018 terjadi penambahan sebanyak 2.297 jiwa dan

**Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Prabumulih, 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (orang) <sup>f</sup>	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	177 078	2 601	101,48
2016	179 563	2 485	101,44
2017	182 128	2 565	101,39
2018	184 425	2 297	101,35
2019	186 834	2 409	101,88

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kota Prabumulih, 2010, 2017, 2018 dan 2019**

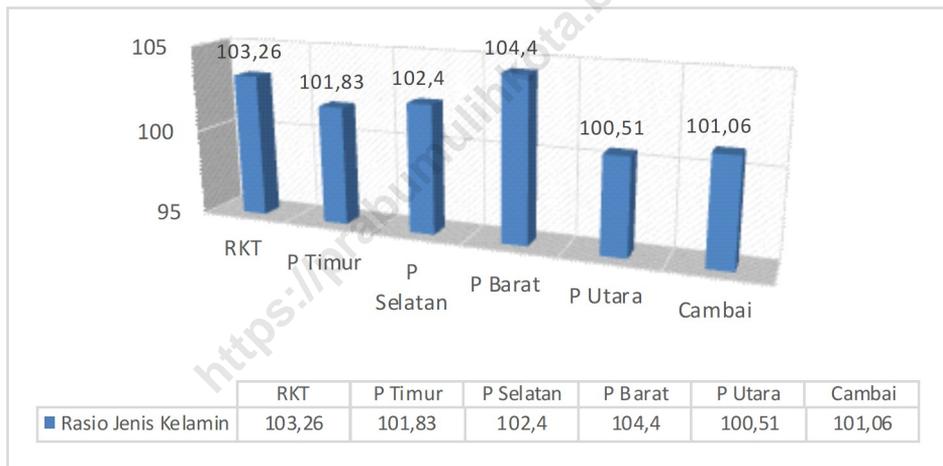
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			
	2010	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
Rambang Kapak Tengah	10 881	12 263	12 460	12 773
Prabumulih Timur	57 044	70 021	71 687	73 202
Prabumulih Selatan	17 014	18 708	18 915	19 119
Prabumulih Barat	29 569	30 805	30 812	30 886
Prabumulih Utara	31 524	32 761	32 874	32 874
Cambai	15 952	17 570	17 980	17 980
<b>Prabumulih</b>	<b>161 984</b>	<b>182 128</b>	<b>184 425</b>	<b>186 834</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

pada tahun 2019 terjadi penambahan sebanyak 2.409 jiwa .

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Prabumulih pada tahun 2019 sebesar 102. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Prabumulih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio Jenis Kelamin Penduduk tertinggi berada di

**Gambar 2.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Prabumulih, 2019**



Kecamatan Prabumulih Barat yang mencapai 104 dan Rasio Jenis Kelamin terendah berada pada Kecamatan Prabumulih Utara yang mencapai 101.

### Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah

penduduk yang relatif sedikit.

Seiring jumlah penduduk yang semakin bertambah, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk pada suatu wilayah. Tahun 2015, kepadatan penduduk Kota Prabumulih sebesar 407 orang/km<sup>2</sup>

**Tabel 2.3. Indikator Demografi Prabumulih, 2015-2019**

Indikator Demografi	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (ribu orang)	177,08	179,56	182,13	184,43	186,83
Laju Pertumbuhan Penduduk Eksponensial (persen/tahun)	1,49	1,40	1,43	1,26	1,3
Rasio Jenis Kelamin (persen)	101,48	101,44	101,39	101,35	101,88
Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	407	413	419	424	430
<b>Komposisi Penduduk (persen)</b>					
0-14 tahun	29,61	29,38	29,13	28,89	28,65
15-64 tahun	66,75	66,88	67,02	76,15	69,43
65+ tahun	3,65	3,74	3,85	3,97	1,92
Angka Beban Ketergantungan (persen)	49,82	49,51	49,21	43,16	48,14

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik

dan meningkat menjadi 430 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2019. Salah satu permasalahan terkait kepadatan penduduk yaitu persebaran penduduk yang tidak merata dimana penduduk lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Persebaran penduduk di Kota Prabumulih sangat bergantung pada fasilitas perekonomian yang ada di daerah tersebut. Daerah-daerah yang terdapat pasar dan pertokoan menunjukkan kepadatan penduduk

yang tinggi, sedangkan daerah-daerah yang minim fasilitas menunjukkan kepadatan penduduk yang rendah.

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65+ tahun). Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Prabumulih adalah penduduk usia produktif dengan *trend* yang semakin meningkat di atas 65 persen, sementara persentase penduduk usia muda menunjukkan trend yang menurun.

### **Angka Beban Ketergantungan**

Peningkatan struktur penduduk usia produktif dan penurunan struktur penduduk usia tidak produktif (usia muda dan lansia) memberikan dampak pada angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan menunjukkan kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir, yakni dari 49,82 pada tahun 2015 menjadi 48,14 pada tahun 2019. Angka beban ketergantungan Kota Prabumulih masih lebih tinggi jika dibandingkan angka nasional. Angka beban ketergantungan sebesar 48,14 dapat diartikan setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 48 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Saat ini Kota Prabumulih berada pada era bonus demografi.

### **Penggunaan Alat/Cara KB**

Disamping pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Tabel 1.4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persentase perempuan berumur 19-45 tahun berstatus kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Kenaikan persentase akseptor KB ini perlu diapresiasi dan ditingkatkan lagi oleh pemerintah Kota

Prabumulih sehingga menjadi trend yang terus menurun setiap tahunnya.

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB dengan memperhatikan berbagai faktor seperti keamanan, efek samping, harga yang terjangkau, penggunaan yang praktis serta memberi kenyamanan bagi penggunanya. Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur Kota Prabumulih, namun yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan dan pil KB. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB kemudian diikuti penggunaan Pil KB dan Susuk KB.

**Tabel 1.4. Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2018 dan 2019**

Alat/Cara Kontrasepsi	2018	2019
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	1.17	2.69
MOP/Vasektomi	0.00	0.00
IUD/Spiral	12.21	6.32
Suntikan	45.80	52.83
Susuk KB	11.58	9.57
Pil	23.91	15.96
Kondom	2.25	1.83
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0.00	0.00
Cara Tradisional	0.20	5.80
Wanita yang sedang menggunakan alat KB	53,56	57,14

Sumber: Susenas Kor 2018-2019

Pada

Pada tahun 2019, Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir sebesar 43,86 persen



Persentase perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan yaitu sekitar 99,41 persen di tahun 2019

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## **BAB III**

### **KESEHATAN**

Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur utama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan tetapi merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan meningkatkan produktivitasnya. Dalam RPJPD 2005-2025, pemerintah Kota Prabumulih telah mengagendakan pembangunan kesehatan diantaranya dengan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan standar pelayanan yang baik, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase wanita yang penolong persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

#### **Derajat dan Status Kesehatan Penduduk**

Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dengan kondisi fisik namun juga lingkungan serta akses terhadap makanan bergizi, akses pelayanan kesehatan hingga budaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk

menggambarkan capaian derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Morbiditas atau angka kesakitan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui derajat kesehatan suatu wilayah. Angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut

**Tabel 2.1. Angka Kesakitan di Kota Prabumulih, 2018 dan 2019**

Angka Kesakitan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	8,86	12,88
Perempuan	11,77	13,08
<b>Kelompok Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	11,34	12,13
40 Persen Tengah	10,48	13,30
20 Persen Teratas	7,85	14,02
<b>Kota Prabumulih</b>	<b>10,30</b>	<b>12,98</b>

Sumber: Susenas Kor 2018-2019

dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2019 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Prabumulih mencapai 12,98 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,30 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2019 pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas lebih tinggi dari penduduk kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan terbawah.

Dari setahun terakhir (tahun 2019), Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir sebesar 43,86 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 45,12 persen. Pada tahun 2019 hanya sebanyak 59,53 persen menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, yang berarti juga menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,58 persen. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di tahun 2019 terbanyak memiliki BPJS Kesehatan sebesar 66,31 persen, memiliki Jamkesda sebanyak 0,10 persen, memiliki asuransi swasta sebanyak 0,31 persen, sisanya memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan sebesar 1,06 persen.

**Tabel 2.1. Indikator Kesehatan di Kota Prabumulih, 2018 dan 2019**

Indikator Kesehatan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam sebulan terakhir</b>		
Laki-laki		44,08
Perempuan		43,66
<b>Total</b>		<b>43,86</b>
<b>Persentase Penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir</b>		
Laki-laki		4,77
Perempuan		9,04
<b>Total</b>		<b>6,89</b>

Sumber: Susenas Kor 2018-2019

Sementara itu, Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir hanya sebesar 6,89 persen. Dimana penduduk yang sakit tersebut, sebesar 86,09 persen menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap .

### **Tingkat Imunitas dan Gizi Balita**

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar, mereka yang mengalami kurang gizi tidak akan berprestasi di sekolahnya. Sejalan dengan hal itu, maka ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal bagi seorang anak. Setelah sang anak lahir, pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun

Berdasarkan hasil Susenas, menunjukkan bahwa anak usia di bawah 2 tahun yang pernah disusui pada Tahun 2018 ada sebanyak 89,73 persen, keadaan ini meningkat menjadi 93,18 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran ternyata lebih banyak persentase anak usia di bawah 2 tahun yang pernah disusui oleh kelompok pengeluaran 20 persen teratas dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan 40 persen tengah. Jika dilihat berdasarkan pendidikan KRT ternyata lebih banyak persentase anak usia di bawah 2 tahun yang pernah disusui

oleh KRT yang berpendidikan SMP ke atas dibanding dengan pendidikan SD ke bawah.

Sama halnya peningkatan persentase anak usia di bawah 2 tahun yang pernah disusui, rata-rata lama anak disusui pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 11,14 bulan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 9,68 bulan. Kondisi tersebut masih cukup jauh dari angka yang dianjurkan yaitu seorang anak sebaiknya diberi ASI/disusui hingga usia 2 tahun atau 24 bulan mengingat pentingnya ASI dalam meningkatkan imunitas dan pertumbuhan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Pada tahun 2019, Persentase Penduduk Berumur 0–59 Bulan (Balita) yang mendapat Imunisasi Lengkap menurut Susenas Maret baru mencapai 44,38 persen. Pada kelompok pengeluaran 20 teratas Balita yang mendapat imunisasi lengkap merupakan kelompok dengan persentase terbesar dibanding kelompok pengeluaran yang lain yaitu sebesar 49,10 persen. Kekhawatiran masyarakat akan adanya vaksin palsu serta kehalalan bahan pembuat vaksin mungkin merupakan salah satu alasan para orang tua tidak mau mengimunisasi anak-anak mereka.

### **Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Tenaga medis merupakan salah satu bagian dalam sistem kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Pentingnya peranan tenaga medis salah satunya adalah menurunkan angka kematian ibu, yaitu dengan meningkatkan pertolongan persalinan dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan pada Tahun 2019 sudah sangat baik yaitu sebanyak 98,94% persen meningkat dari tahun

**Tabel 2.1. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Prabumulih, 2018-2019**

<b>Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Tenaga Kesehatan</b>		
Dokter Kandungan	44,50	36,86
Dokter Umum	2,15	7,10
Bidan	51,64	54,98
Perawat / Tenaga Kesehatan lainnya	0,00	0,00
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>		
Dukun Beranak, Paraji	1,71	1,06
Lainnya	0,00	0,00
Tidak Ada	0,00	0,00

Sumber: Susenas Kor, 2018 dan 2019

sebelumnya yang sebesar 98,29 persen. Sementara itu sebanyak 1,06 persen ditolong oleh selain tenaga kesehatan.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan

**Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2018 dan 2019**

memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat</b>		
Rumah Sakit	5.12	9.53
Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas Kesehatan	72.42	67,76
Puskesmas Pembantu & UKBM	23.71	22.43
Pengobatan Tradisional	1.88	2.24
Lainnya	0.00	0.00
<b>Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan</b>	<b>45.12</b>	<b>43.86</b>

Sumber: Susenas Kor, 2018 dan 2019

menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di pedesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah pedesaan.

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional telah membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau. Bila diamati menurut fasilitas kesehatan, sebagian besar penduduk lebih banyak memilih fasilitas kesehatan Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas Kesehatan, ini terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dipilihnya fasilitas ini karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan di rumah sakit. Fenomena yang cukup menarik yaitu semakin meningkatnya pengobatan tradisional di kalangan masyarakat pedesaan. Kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam termasuk dalam menyembuhkan penyakit turut mendorong meningkatnya pengobatan tradisional daerah pedesaan di Kota Prabumulih.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas  
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2019

16,33 Persen

Tidak Punya Ijazah

28,14 Persen

Sekolah Dasar

21,39 Persen

SMP

26,06 Persen

SMA

8,06 Persen

Perguruan Tinggi

Sekitar 49,53 persen penduduk Sumatera Selatan menyelesaikan wajib belajar 9 tahun

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN**

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sebagai RPJMN 2024 diusung tema peningkatan SDM dalam pertumbuhan berkualitas. Perencanaan ke depan akan berfokus pada pengembangan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan atau sesuai *Sustainable Development Growth* (SDGs) dengan target berprestasi menengah tinggi.

Sebagaimana halnya di Indonesia, pendidikan di Kota Prabumulih juga terus berbenah agar lebih maju dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Untuk dapat melihat sejauh mana capaian pembangunan khususnya bidang pendidikan dapat digunakan beberapa indikator output yang dihasilkan BPS antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Adapun sebagai Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Meskipun banyak peningkatan positif dari indikator-indikator pembangunan pendidikan tersebut, tetapi masih ada beberapa indikator pendidikan Kota Prabumulih yang perlu mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan di masa mendatang.

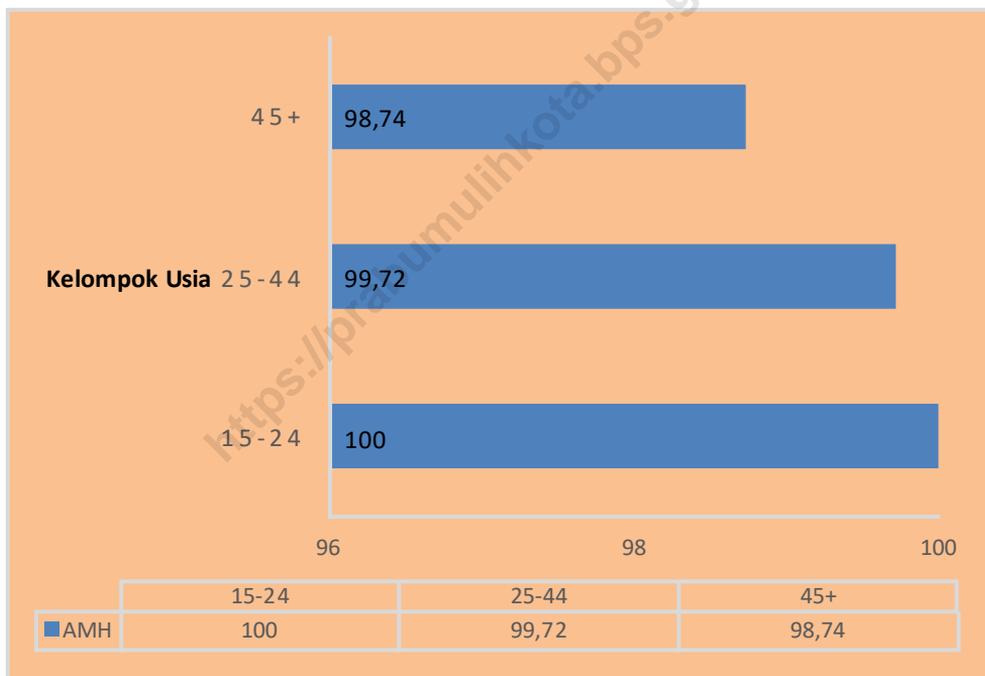
#### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Angka Melek Huruf Kota Prabumulih terus meningkat. Pada periode 2011 hingga 2019 atau dalam kurun waktu 8 tahun AMH Kota Prabumulih naik dari 96,76 persen pada 2011 menjadi 96,80 persen pada 2019. Kenaikan ini berkisar 0,04 persen per tahun. Pada tahun 2019 AMH Kota Prabumulih mencapai 96,8 persen yang berarti sekitar

96,8 persen masyarakat Kota Prabumulih berusia 15 tahun ke atas sudah melek huruf, sementara sisanya yaitu sebesar 3,2 persen termasuk kategori buta huruf. Jika dicermati berdasarkan kelompok umur, maka kelompok umur yang angka melek hurufnya paling rendah adalah kelompok usia 45 tahun ke atas (98,74 persen). Semakin muda usia menunjukkan masyarakat yang semakin melek huruf. AMH Penduduk usia 15-44 tahun di Kota Prabumulih adalah 99,72 persen.

**Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut kelompok umur, 2019**



Sumber: Susenas, 2011-2019

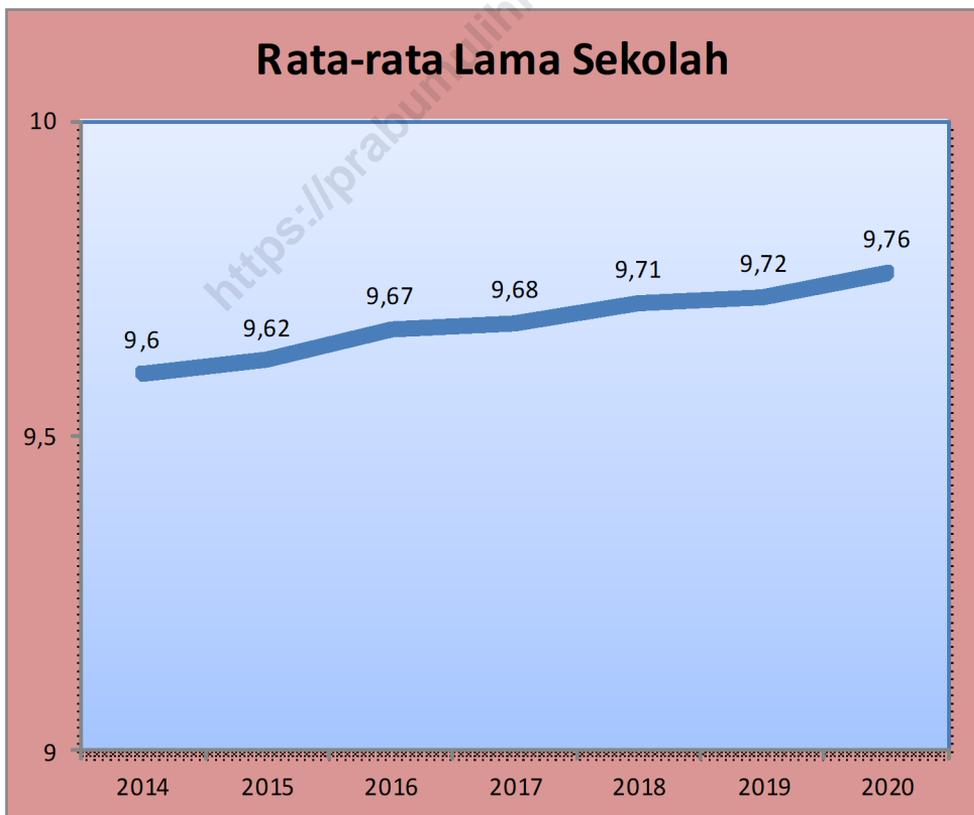
### Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu capaian dalam pembangunan pendidikan. Dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang menjadi penentu nilai indeks pendidikan. Rata-rata lama sekolah

dihitung pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Artinya rata-rata lama sekolah dihitung pada penduduk usia yang telah selesai menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Prabumulih tahun 2019 adalah 9,72. Artinya penduduk Prabumulih usia 25 tahun ke atas pada tahun 2019 rata-rata mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau setara kelas 3 SLTP. Peningkatan nilai rata-rata lama sekolah di Prabumulih menjadi modal penting peningkatan kualitas SDM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kegiatan Kejar Paket.

**Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah Kota Prabumulih (tahun), 2014-2019**

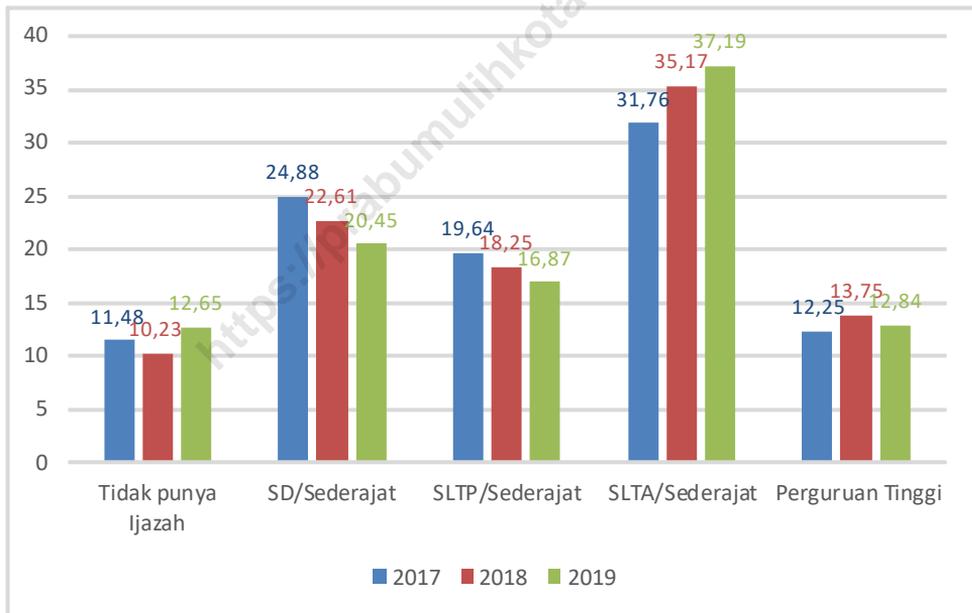


Sumber: Susenas, 2010-2019

## Penduduk Menurut STTB/Ijazah Tertinggi

Banyaknya penduduk yang berhasil memperoleh STTB/ijazah tertinggi merupakan indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan formal. Sepanjang periode tahun 2017-2019 persentase penduduk Kota Prabumulih yang mendapatkan ijazah level dasar menurun sedangkan yang memperoleh ijazah untuk pendidikan SLTA/ sederajat dan perguruan tinggi meningkat.

**Gambar 3.3. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki, 2017-2019**



Sumber: Susenas, 2017-2019

Untuk level Sekolah Dasar sederajat sekitar 20,45 persen yang berhasil menamatkan SD dan 16,87 persen yang berhasil menamatkan level SMP. Jika ditambahkan maka untuk level Sekolah Dasar (SD dan SLTP) terdapat setidaknya 37,32 persen penduduk Kota Prabumulih yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Data ini sejalan dengan rata-

rata lama sekolah Prabumulih yang sudah menyentuh level 9 tahun atau kelas 3 SMP.

Pada tahun 2019 persentase penduduk Kota Prabumulih yang memiliki ijazah SMA ke atas meningkat jika dibandingkan pada 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 sekitar 31,76 persen penduduk Kota Prabumulih memperoleh ijazah SMA ke atas. Angka ini naik menjadi 35,17 persen di tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 37,19 persen. Ini mengindikasikan penduduk Kota Prabumulih lebih teredukasi di level pendidikan tinggi.

### **Partisipasi Sekolah (APS dan APM)**

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Growth (SDG's)*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah menjamin semua anak, perempuan dan laki-laki pada tahun 2030 menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

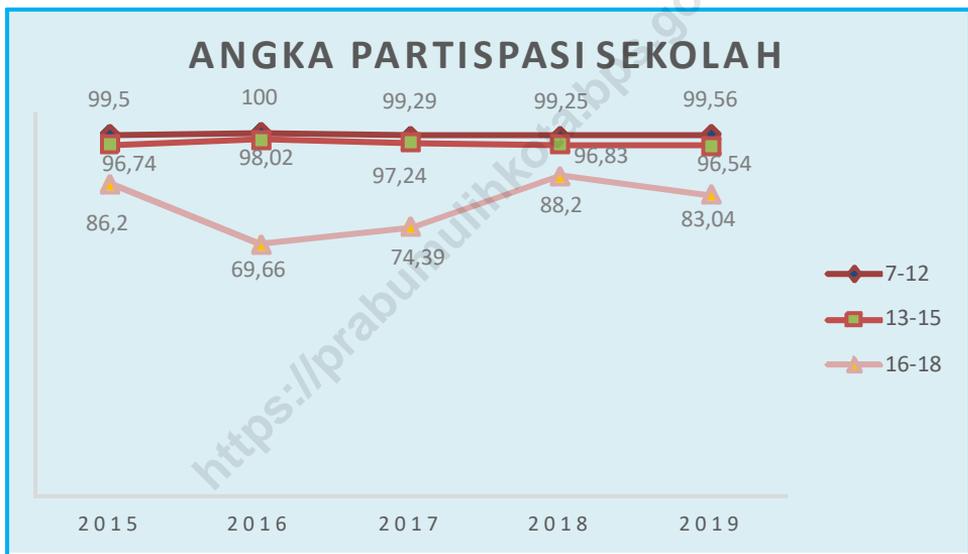
Untuk melihat sudah seberapa besar penduduk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah atau yang biasa disingkat dengan APS. Secara definisi APS merupakan perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Umumnya APS dihitung untuk kelompok usia 7-12 tahun; 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun. Semakin tinggi nilai APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2019 APS untuk usia 7-12 tahun di Kota Prabumulih sebesar 99,56 artinya dari seluruh penduduk Kota Prabumulih berusia 7-12 tahun sekitar 99,56 persen telah bersekolah. Dan hanya terdapat 0,44 persen saja penduduk usia 7-12 tahun Kota Prabumulih yang belum

mengenyam pendidikan. Jika mencermati *trend* sepanjang tahun 2015-2019, APS untuk usia 7-12 tahun di Kota Prabumulih terus naik setiap tahunnya. Pada tahun 2015 APS usia 7-12 tahun di Kota Prabumulih mencapai 99,5 dan terus naik hingga mencapai nilai 99,56 di tahun 2019.

Untuk APS usia 13-15 tahun di Kota Prabumulih juga mengalami

**Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Prabumulih Menurut Kelompok Umur, 2015-2019**



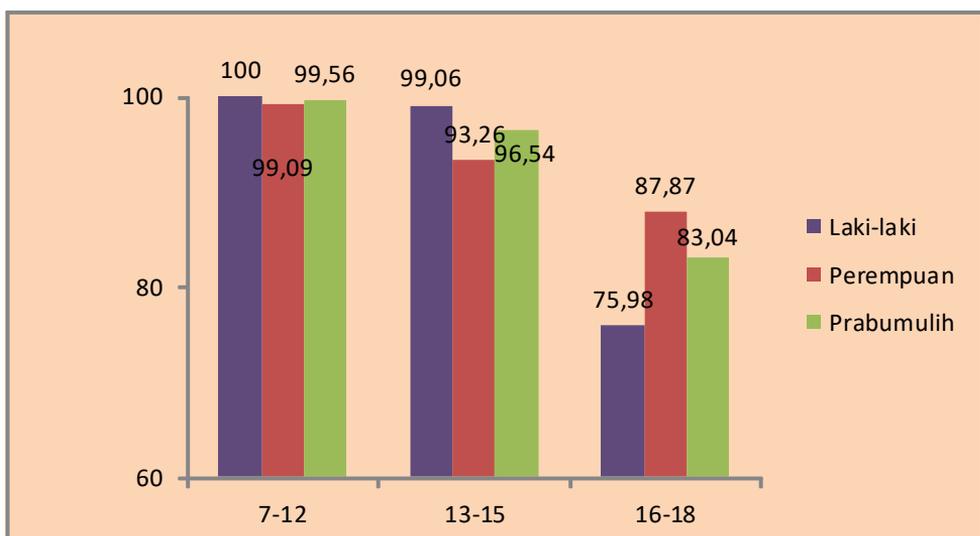
Sumber: Susenas, 2015-2019

kenaikan sepanjang periode tahun 2015-2018. Pada tahun 2015 APS usia 13-15 tahun di Kota Prabumulih sebesar 96,74 persen dan meningkat menjadi 96,83 persen di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 96,54 persen. Trend yang meningkat ini tentu tidak lepas dari berbagai program pembangunan pendidikan dari Pemerintah, terutama program wajib belajar 9 tahun dan program sekolah gratis.

APS Kota Prabumulih tahun 2019 untuk kategori usia 16-18 tahun masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Terdapat gap yang cukup jauh antara APS kelompok umur 16-18 tahun yang berada di bawah APS kelompok umur 7-12 tahun dan APS 13-15 tahun. Pada tahun 2019 APS usia 16-18 tahun di Kota Prabumulih sebesar 83,04 persen.

Berdasarkan jenis kelaminnya, kelompok usia 7-12 dan 13-15 lebih besar APS laki-laki dari pada APS perempuan. Namun pada kelompok usia 16-18, APS perempuan jauh lebih tinggi dari pada APS laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perempuan di Kota Prabumulih lebih memperhatikan pendidikan dibandingkan laki-laki. Bagi perempuan, fenomena ini memberikan dampak positif karena penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan berpendidikan tinggi akan mengurangi mortalitas balita, mengurangi kematian ibu melahirkan, mengurangi Perkawinan dini, menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi KDRT serta pelecehan seksual.

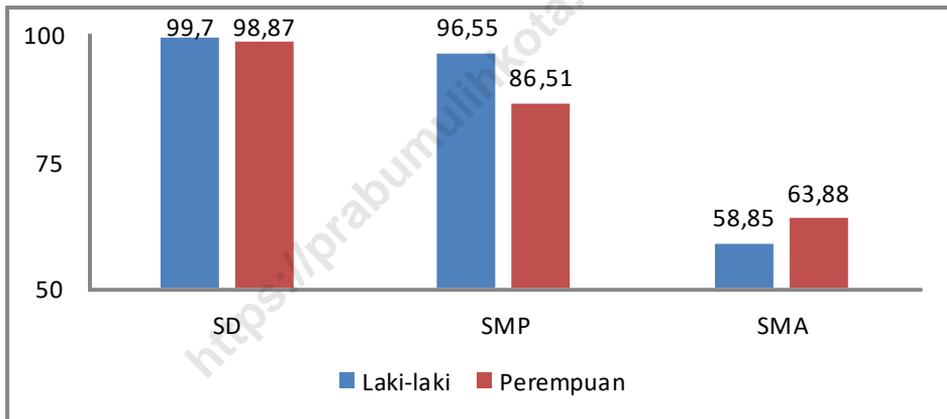
**Gambar 3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kota Prabumulih Menurut Jenis Kelamin, 2019**



Sumber: Susenas, 2019

Pada tahun 2019 APS usia 13-15 tahun laki-laki sebesar 93,64 persen sedangkan perempuan sebesar 95,47 persen. Untuk kelompok umur 15-18 tahun di , APS perempuan sebesar 71,81 persen, juga lebih tinggi dari pada APS laki-laki yang sebesar 68,91 persen. Tingginya APS perempuan dibanding laki-laki di utamanya karena APS perempuan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun di wilayah pedesaan di lebih tinggi dari pada APS laki-laki. Untuk wilayah perkotaan APS kedua kelompok umur tersebut tidak berbeda jauh.

**Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Prabumulih Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, 2019**



Sumber: Susenas, 2019

Angka Partisipasi Murni atau biasa disebut APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Peningkatan APM mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya atau tepat waktu. Pada tahun 2019 APS usia 13-15 tahun laki-laki sebesar 99,06 persen sedangkan perempuan sebesar 93,26 persen. Untuk kelompok umur 15-18 tahun di Prabumulih, APS perempuan sebesar 87,87 persen, lebih tinggi dari pada APS laki-laki yang sebesar 75,98 persen.

Angka Partisipasi Murni atau biasa disebut APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Peningkatan APM mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya atau tepat waktu.

APM Kota Prabumulih tahun 2019 untuk level pendidikan dasar (SD dan SLTP), APM laki-laki lebih tinggi dari APM perempuan. Sedangkan untuk tingkat SLTA APM perempuan yang lebih tinggi dari pada APM laki-laki.

### **Kualitas Pelayanan Pendidikan**

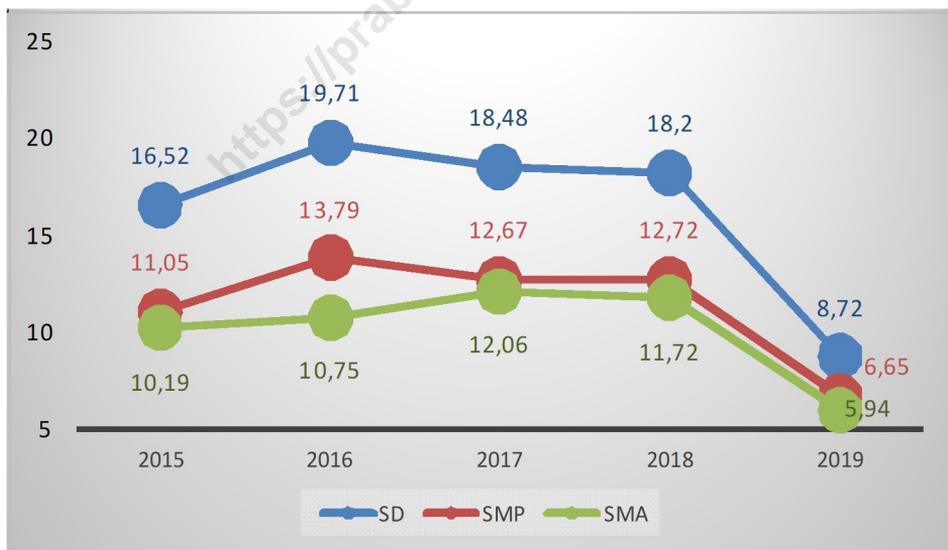
Pendidikan dapat berlangsung maksimal dan mencapai sasaran yang diharapkan jika ditunjang pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pelayanan pendidikan di sini mencakup sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Depdiknas (2008) sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sebagai contoh sarana adalah ruang kelas, buku, papan tulis dan lain sebagainya. Prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan prioritas pemerintah untuk mewujudkan SDM maju, maka harus dibarengi peningkatan pembangunan yang menunjang terwujudnya SDM maju, yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Permasalahan yang kerap ditemui adalah adanya disparitas pendidikan antar wilayah. Pembangunan pendidikan yang belum merata menjadi suatu permasalahan tersendiri yang sudah harus dicari solusinya. Munculnya disparitas pendidikan antar wilayah sering kali dilatar belakangi lokasi dan kondisi geografis yang

berbeda-beda. Untuk itu, Pemerintah diharapkan mampu mengurangi disparitas pendidikan antar wilayah..

Selama kurun tahun 2015-2019 tidak terjadi perubahan signifikan rasio murid-guru baik pada level SD sederajat maupun SLTP sederajat. Peningkatan cukup signifikan pada level SLTA sederajat. Pada tahun 2015 untuk level SD untuk satu orang guru di Prabumulih mengajar rata-rata 15 murid, sedangkan pada tahun 2019 satu orang guru SD rata-rata mengajar 16 murid. Untuk SLTP pada tahun 2015 satu orang guru rata-rata mengajar 11 murid sedangkan pada tahun 2019 satu orang guru SLTP rata-rata mengajar 13 murid. Pada level SLTA satu orang guru pada tahun 2015 rata-rata mengajar 10 murid. Pada tahun 2019 nilainya menurun menjadi 6 murid.

**Gambar 3.7. Perkembangan Rasio Murid-Guru Tahun Ajaran 2015 - 2019**



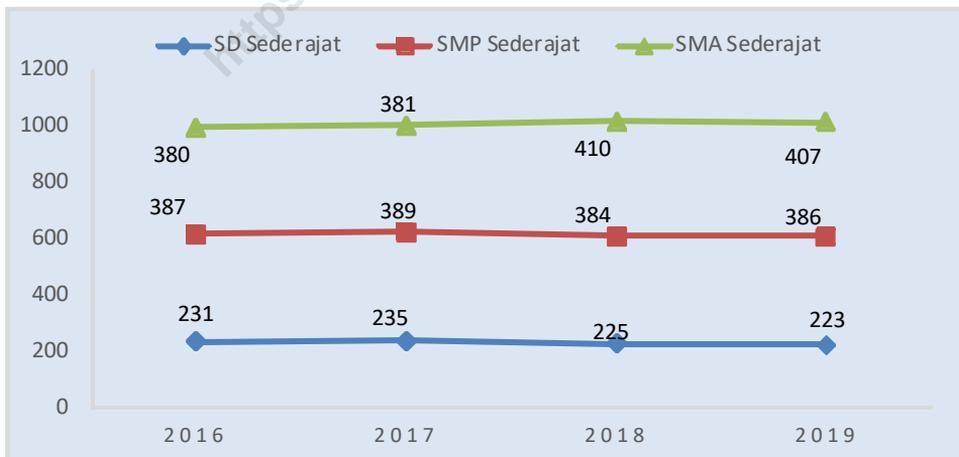
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015-2019

Rasio Murid-Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Indikator ini mampu menggambarkan daya tampung sekolah di Prabumulih sekaligus menggambarkan tersedianya fasilitas

itas gedung sekolah di Prabumulih. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, rasio murid-sekolah pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 satu sekolah SD menampung 231 siswa, sedangkan pada tahun 2019 menampung 223 siswa. Untuk SLTP pada tahun 2016 rata-rata satu sekolah dapat menampung 387 siswa dan turun menjadi 286 siswa di tahun 2019. Pada level SLTA rata-rata satu sekolah di tahun 2016 dapat menampung 380 siswa namun pada tahun 2019 rata-rata menampung 407 siswa.

Rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah menggunakan data yang diperoleh Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih dimana SD sederajat yang dimaksud termasuk SD dan madrasah ibtidaiyah, SMP sederajat termasuk SMP dan madrasah tsanawiyah, SLTA sederajat termasuk SLTA, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

**Gambar 3.8. Perkembangan Rasio Murid-Sekolah Tahun ajaran 2016-2019**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Menurut Jenjang Pendidikan 2020

230 Jiwa  
 $\leq$  SD

985 Jiwa  
SMP

3.507 Jiwa  
SMA

894 Jiwa  
Perguruan Tinggi

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk penduduk berpendidikan tinggi (SLTA ke atas) lebih tinggi dari pada yang berpendidikan SD dan SLTP

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## BAB V

# KETENAGAKERJAAN

Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia Indonesia selayaknya dibarengi penyediaan lapangan kerja terutama untuk generasi terdidik. Data menunjukkan tingkat pengangguran saat ini justru didominasi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini karena umumnya mereka yang pendidikan rendah tidak memilih pekerjaan. Sedangkan yang menamatkan pendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

Problematika ketenagakerjaan di Kota Prabumulih tidak jauh berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya. Meskipun tingkat pengangguran terbuka Kota Prabumulih lebih rendah dari angka nasional, namun masalah produktivitas masih menjadi tantangan. Jumlah penduduk yang jam kerjanya di bawah 35 jam seminggu masih cukup tinggi. Tantangan terbesar lainnya adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang harus diantisipasi dari sejak dini sebelum terjadi peningkatan karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus, yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja, dan peningkatan produktivitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga dapat memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

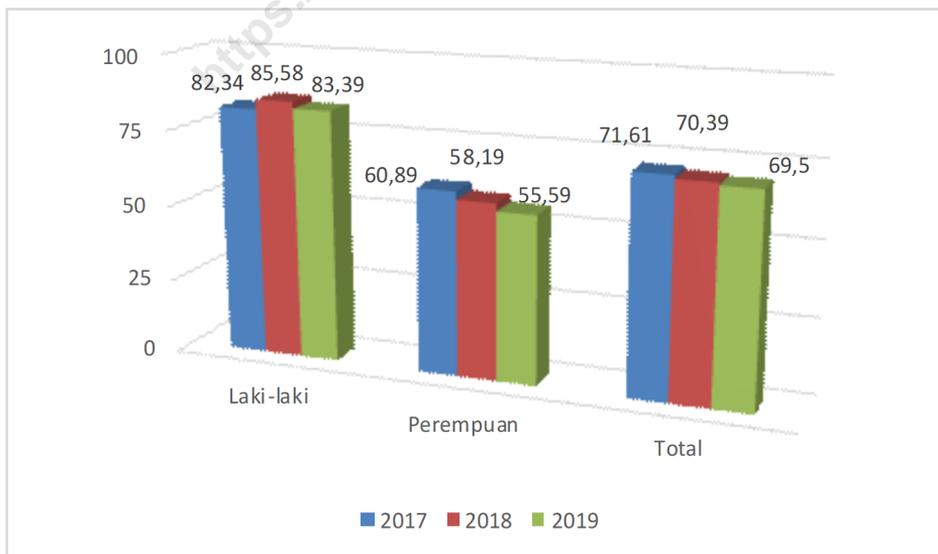
Dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sangat penting menggunakan data yang terkait ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menekankan perkembangan antar tahun 2019 dan 2020. Analisis ini menarik karena menggambarkan situasi ketenagakerjaan Prabumulih

Data-data terkait ketenagakerjaan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dimulai dari Sakernas 2019, penghitungan dilakukan dengan menggunakan proyeksi hasil SUPAS 2015. Karena hal tersebut penghitungan indikator sebelumnya yang menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk dikoreksi. Untuk menjaga keterbandingan, penyajian data series akan menggunakan estimasi dengan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.

### TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK didefinisikan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi angka TPAK menjadi sebuah indikator meningkatnya kecenderungan angkatan kerja untuk mencari pekerjaan atau melakukan aktivitas ekonomi.

**Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)  
di Kota Prabumulih**



Sumber : Sakernas Agustus, 2017-2019

TPAK Prabumulih turun pada Agustus 2018 dan turun kembali pada Agustus 2019. Penurunan TPAK pada Agustus 2018 disebabkan turunnya TPAK perempuan. Artinya pada tahun 2018 penduduk perempuan yang aktif di pasar kerja menurun, baik penduduk bekerja maupun penduduk perempuan yang mencari pekerjaan (menganggur).

### TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Prabumulih pada Agustus 2019 yaitu 6,05 persen. Angka ini lebih rendah dari Agustus 2018 dengan nilai TPT sebesar 6,99 persen. Namun angka pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari tahun 2017 sebesar 6,73 persen.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang tertampung dalam pasar kerja. Indikator ini menunjukkan kemampuan sektor perekonomian dalam menyediakan daya tampung bagi penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja.

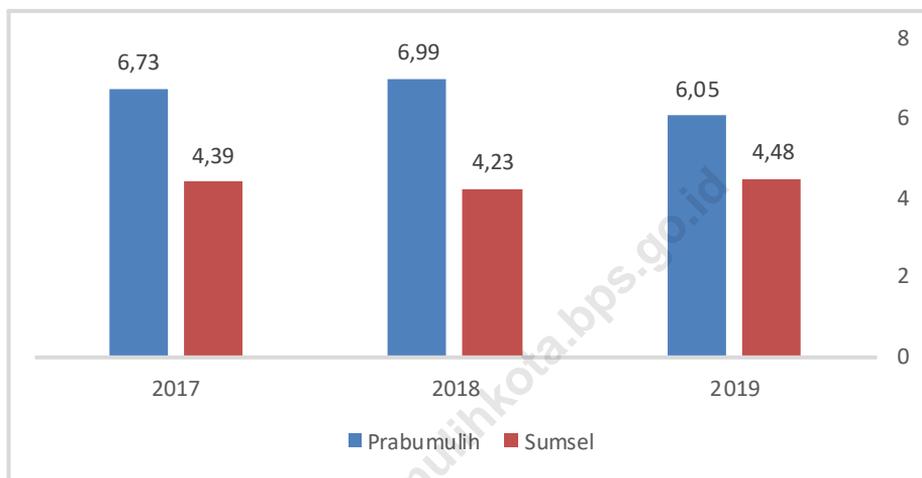
**Grafik 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Prabumulih, 2017-2019**



Sumber : Sakernas Agustus, 2017-2019

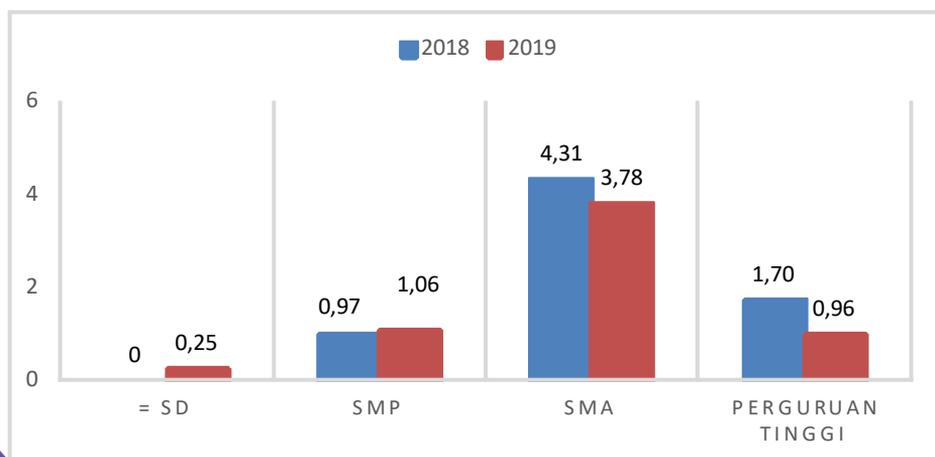
## TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

**Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) di Kota Prabumulih dan Sumatera Selatan, 2017-2019**



Sumber : Sakernas , 2017—2019

**Gambar 4.4 Tingkat Pengangguran (Persen) Menurut Jenjang Pendidikan di Prabumulih, 2018-2019**



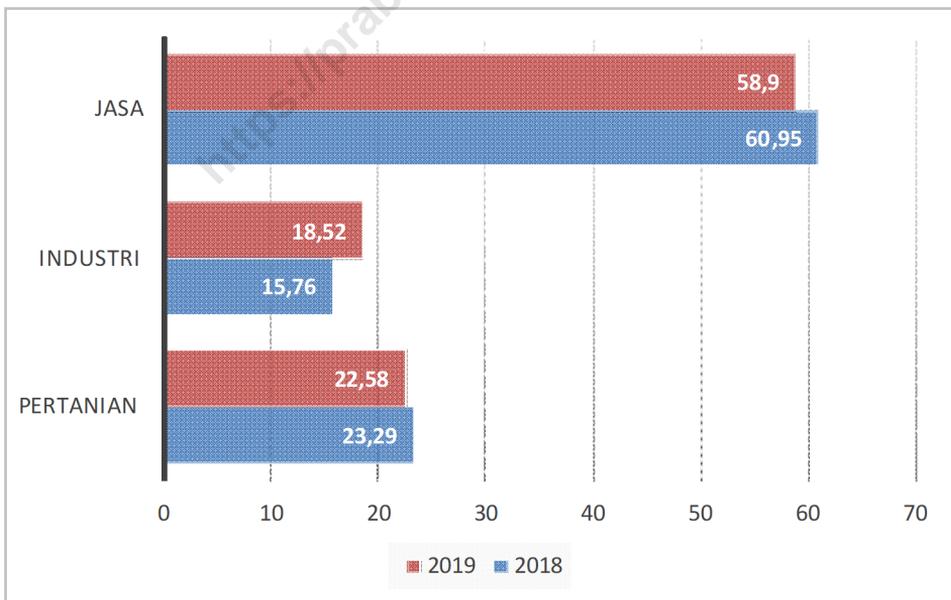
Sumber : Sakernas Agustus , 2018-2019

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk penduduk berpendidikan tinggi (SLTA ke atas) lebih tinggi dari pada yang berpendidikan SD dan SLTP. Hal ini karena umumnya semakin tinggi pendidikan akan lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

### LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini hanya disajikan untuk lima kategori dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu kategori pertanian, perdagangan, industri, konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

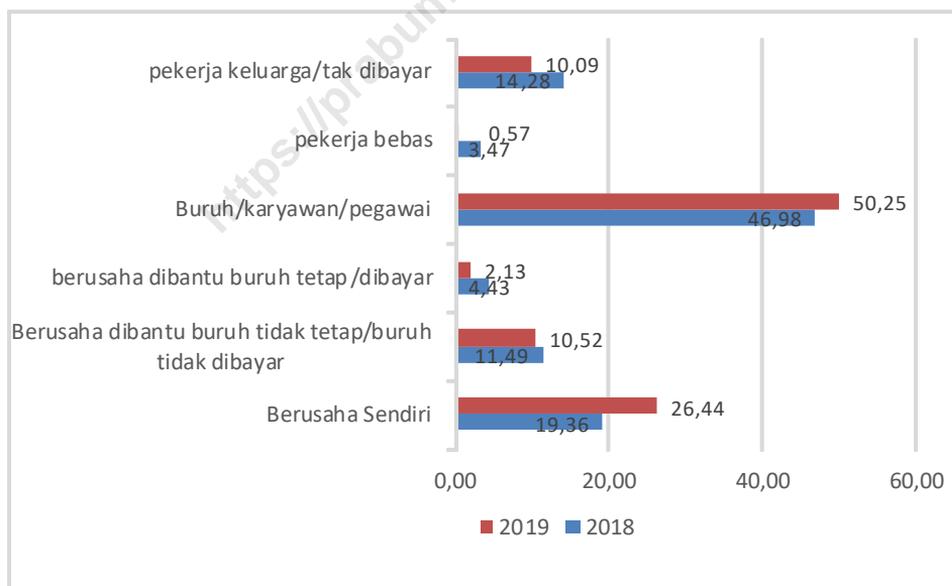
**Gambar 4.5 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha dan jenis kelamin, 2019**



Sumber : Sakernas Agustus , 2019

Secara umum hampir separuh penduduk Kota Prabumulih bekerja pada kelompok kategori lapangan usaha Jasa yaitu sebesar 58,89 persen. Meskipun sektor Jasa ini merupakan sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berangsur turun. Namun pada tahun 2019 persentase penduduk yang bekerja disektor industri pengolahan meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan lainnya yaitu kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

**Gambar 4.6. Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2018 dan 2019**



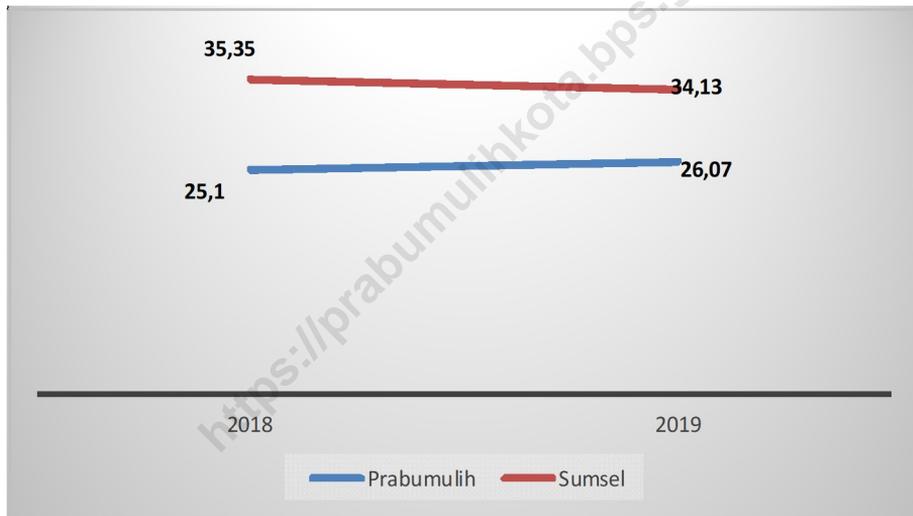
Sumber: Sakernas , 2018 dan 2019

Untuk komposisi pekerja menurut status pekerjaan (gambar 4.6), Prabumulih pada Agustus 2019 terjadi kenaikan persentase buruh/karyawan.

## SETENGAH PENGANGGURAN

Masalah ketenagakerjaan lain yang perlu mendapat perhatian di Kota Prabumulih adalah masalah setengah pengangguran. Seseorang dikategorikan dalam setengah pengangguran jika jam kerja kurang dari 35 jam seminggu. Indikator setengah pengangguran ini menggambarkan produktifitas tenaga kerja. Tingkat setengah pengangguran Prabumulih berada di bawah setengah pengangguran tingkat propinsi.

**Gambar 4.7 Setengah Pengangguran Prabumulih dan Sumsel, 2018 - 2019**



Sumber: Sakernas, 2018 - 2019

<https://prabumulihkota.bps.go.id>



**47,71** Persen

Dari Total Pengeluaran Bulanan Penduduk  
Digunakan untuk **Keperluan Makanan**

**29,62** Persen

Penduduk Kota Prabumulih  
Berada dalam Golongan Pengeluaran  
**Rp. 500.000. — 749.999.**

Sumber: Susenas Maret, 2019

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## BAB VI

# TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga dikatakan sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk bukan makanan.

### PENGGELUARAN RUMAH TANGGA

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapat seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan menurun dari Rp. 1.125.016, di tahun 2018 menjadi Rp. 1.007.104,- di tahun 2019. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya peningkatan

yaitu dari 46,56 persen menjadi 47,71 persen pada tahun 2019. Namun sebaliknya persentase untuk pengeluaran bukan makanan turun dari 53,44 persen pada tahun 2018 menjadi 52,29 persen pada tahun 2019.

**Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2018 - 2019**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase	
	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>523 753</b>	<b>480 493</b>	<b>46,56</b>	<b>47,71</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>601 263</b>	<b>526 611</b>	<b>53,44</b>	<b>52,29</b>
Perumahan	302 916	266 577	<b>26,93</b>	<b>26,47</b>
Barang dan Jasa	141 988	126 337	12,62	12,54
Pakaian	25 752	29 444	2,29	2,92
Barang Tahan Lama	78 546	48 270	6,98	4,79
Lainnya	52 061	56 002	4,63	5,56
<b>Jumlah</b>	<b>1 125 016</b>	<b>1 007 104</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas Maret, 2018- 2019

Menurut teori konsumsi, pendapatan yang dibelanjakan dibedakan menjadi dua. Pertama, pengeluaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan atau untuk konsumsi baik barang ataupun jasa oleh rumah tangga, dan yang kedua disimpan sebagai investasi atau ditabung sehingga dapat dibelanjakan di masa mendatang.

Ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi pada jenis pengeluaran pakaian dan lainnya, sedangkan pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa, dan barang tahan lama justru mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran non makanan perkapita pada semua golongan pengeluaran yaitu mulai dari Rp 150.000,- sampai golongan pengeluaran di atas Rp 1.500.000,- lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran perkapita makanan. Selain itu, separuh penduduk di wilayah Prabumulih berada di golongan pengeluaran di bawah Rp.750.000 atau sebesar 51,64 persen dari total penduduk di Kota Prabumulih.

**Tabel 5.2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut di Kota Prabumulih, 2018 - 2019**

Golongan Pengeluaran	2018	2019
(1)	(2)	(3)
< 150.000	0,00	0,00
150.000 - 199.999	0,00	0,00
200.000 - 299.999	4,56	1,57
300.000 - 499.999	20,64	20,45
500.000 - 749.999	23,29	29,62
750.000 - 999.999	10,38	11,54
1.000.000 - 1.499.999	20,94	14,01
> 1.500.000	20,19	22,82

Sumber: Susenas Maret, 2018- 2019

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpenda-

yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

Hal ini terlihat dari menurunnya persentase penduduk berpendapatan menengah yang semula sebesar 24,38 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 27,58 persen pada tahun 2019. Selama periode 2018-2019, nilai Gini Ratio berfluktuasi. Ketika tahun 2018 mencapai angka sebesar 0,41 Sedangkan di tahun 2019 menurun menjadi 0,34 dibandingkan tahun sebelumnya.

### Konsumsi Protein dan Kalori

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

**Tabel 5.3. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2018-2019**

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	10,85	24,38	64,77	0,41
2019	13,35	27,58	59,07	0.34

Sumber: Susenas Maret, 2018- 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori masyarakat Prabumulih pada tahun 2018 sebanyak 1.639,42 kkal atau meningkat sebesar 21,07 kkal dibanding tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar 1.618,35 kkal. Namun hal ini masih dalam artian konsumsi kalori per hari masyarakat Prabumulih pada tahun 2019 masih belum memenuhi syarat sesuai standar yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.150 kkal dan 57 gram protein. Kondisi ini menandai pentingnya kecukupan kalori Masyarakat di tahun tahun mendatang. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami kenaikan yaitu dari 43,32 gram pada tahun 2018 menjadi 43,43 gram pada tahun 2019, yang berarti sudah masih dibawah ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan.

Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, dimana pola konsumsi merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kese-

jahteraan penduduk adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi.

**Tabel 5.4. Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2018-2019**

Tahun	40 persen terbawah	40 persen tengah 20 persen teratas	
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kalori (kkal)</b>			
2018	1.618,35	2.109,90	2.636,76
2019	1.639,42	2.036,02	2.314,72
<b>Protein (gram)</b>			
2018	43,32	62,73	84,60
2019	43,43	58,57	71,33

Sumber: Susenas Maret, 2017- 2019

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indi-



<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## BAB VII

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Kebutuhan mendasar manusia berupa pangan, sandang, dan papan. Rumah yang menjadi salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia sekaligus sebagai salah faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah tinggal selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang karena dari rumah bermula aktivitas seseorang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Bagi warga negara Indonesia, rumah adalah salah satu hak dasar rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H bahwa setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu dimensi pembangunan manusia salah satu dimensi pembangunan manusia yang termuat dalam strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019.

Rumah selain sebagai tempat tinggal juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas

lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Rumah selain menjadi simbol status sosial ekonomi seseorang, juga berperan membentuk watak, akhlak agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis lantai, dinding, dan atap yang memenuhi syarat. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut serta luas lantai yang sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum, dan tempat pembuangan akhir/tinja. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik menjadi salah satu representasi mengenai kondisi ekonomi dan social penghuninya yang lebih baik dibandingkan mereka yang menempati bangunan tempat tinggal dengan kualitas bangunan yang rendah.

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan perencanaan monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data terkait perumahan yang berkesinambungan sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pemenuhan pengadaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Secara periodik, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi tempat tinggal atau rumah melalui Susenas KOR.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

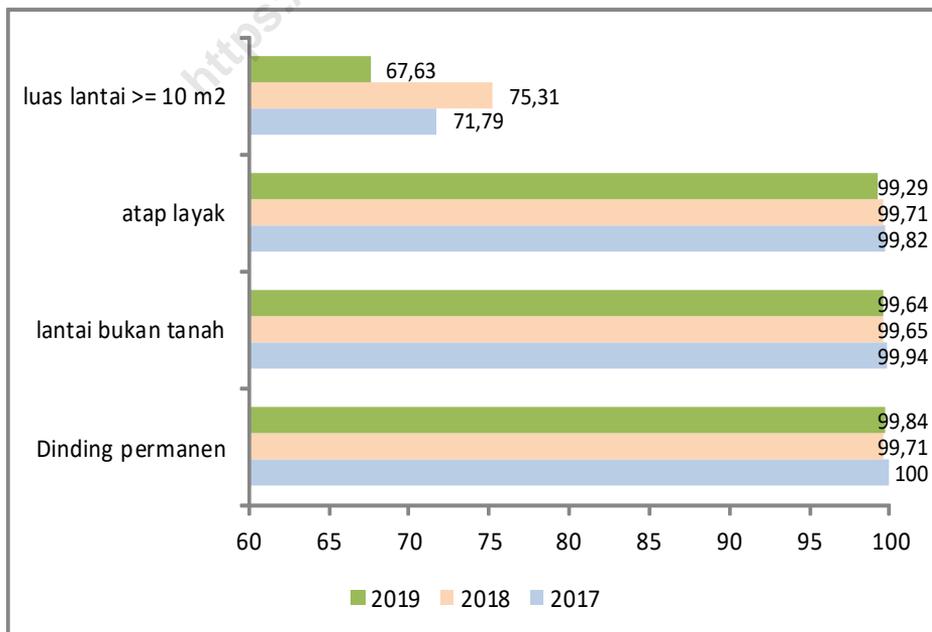
Derajat kesejahteraan dan kesehatan rumah tangga juga bisa diukur dari kondisi fisik bangunan tempat tinggal. Rumah tinggal dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki

beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding, dan atap yang memenuhi syarat serta mempunyai luas lantai yang mencukupi atau sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu, kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik, umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Jenis lantai tempat tinggal merupakan salah satu pengukuran. Jenis lantai yang ditempati rumah tangga memiliki relasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama tingkat pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga maka

**Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Kota Prabumulih, 2017—2019**

kondisi lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas.



Sumber: Susenas Maret 2017 - 2019

Berdasarkan Susenas 2017 sampai 2019, di daerah Kota Prabumulih, rumah tangga yang menggunakan lantai dari bukan tanah mengalami penurunan sebanyak 0,01 persen. Pada Tahun 2019, hanya 7 dari 1000 rumah tangga yang menggunakan atap rumah yang tidak layak. Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2019, sebagian besar rumah tangga di Kota Prabumulih atau lebih kurang 99 persen dari total rumah tangga menempati tempat tinggal dengan jenis lantai terluas terbuat bukan dari tanah dan lainnya. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Prabumulih telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang layak. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2019 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, asbes, seng, dan sirap (bukan ijuk) mencapai 99,29 persen atau mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (99,71 persen).

Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan dinding terluas bukan bambu/lainnya di Kota Prabumulih semakin membaik, dikarenakan mengalami peningkatan dari 99,71 persen pada tahun 2018 menjadi 99,84 persen tahun 2019.

Tingkat kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin berkualitas. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang dikategorikan menjadi beton, genteng, asbes, seng, bamboo, jerami, dan lainnya. Dari Gambar 7.1 menunjukkan secara rata-rata rumah tangga di wilayah Prabumulih lebih kurang 99 persen sudah menggunakan atap dengan bahan yang baik yaitu bukan jerami, ijuk, daun-daunan, rumbia, dan lainnya.

Sumber: Susenas Maret 2019

Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan sekaligus menggambarkan pengetahuan penduduk tentang tempat tinggal. Kemampuan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah masih terbatas untuk membeli rumah yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur.

### **Fasilitas Rumah Tinggal**

Suatu pemahaman mengenai rumah tinggal yang ideal selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Adanya pergeseran pemahaman tersebut akibat adaptasi manusia data dari hasil survei rumah tangga Susenas. Pendekatan kedua menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik rumah tangga menggunakan data sekunder dari PLN. Indikator yang dihasilkan dari kedua pendekatan tersebut akan berbeda. Melalui pendekatan rumah tangga, data yang dikumpulkan akan menggambarkan berbagai jenis sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga tanpa bisa melihat apakah jaringan atau instalasi listrik yang digunakan adalah meteran sendiri atau menggunakan meteran milik rumah tangga lain. Efeknya adalah penggunaan sumber penggunaan sumber penerangan dari listrik angkanya akan mendekati angka 100 persen.

Sementara data dari sumber PLN lebih menekankan ke aspek jaringan atau instalasi menurut jenis bangunan apakah tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas sosial, kantor pemerintah, atau yang lainnya. Ukuran yang dihasilkan disebut rasio elektrifikasi yaitu rasio antara jumlah instalasi atau sambungan listrik ke konsumen rumah tangga dibagi dengan banyaknya bangunan yang ditempati oleh rumah tangga atau jumlah rumah tangga. Angka yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah. Karena rumah tangga yang tidak memiliki meteran atau instalasi sendiri akan dianggap belum memiliki jaringan listrik.

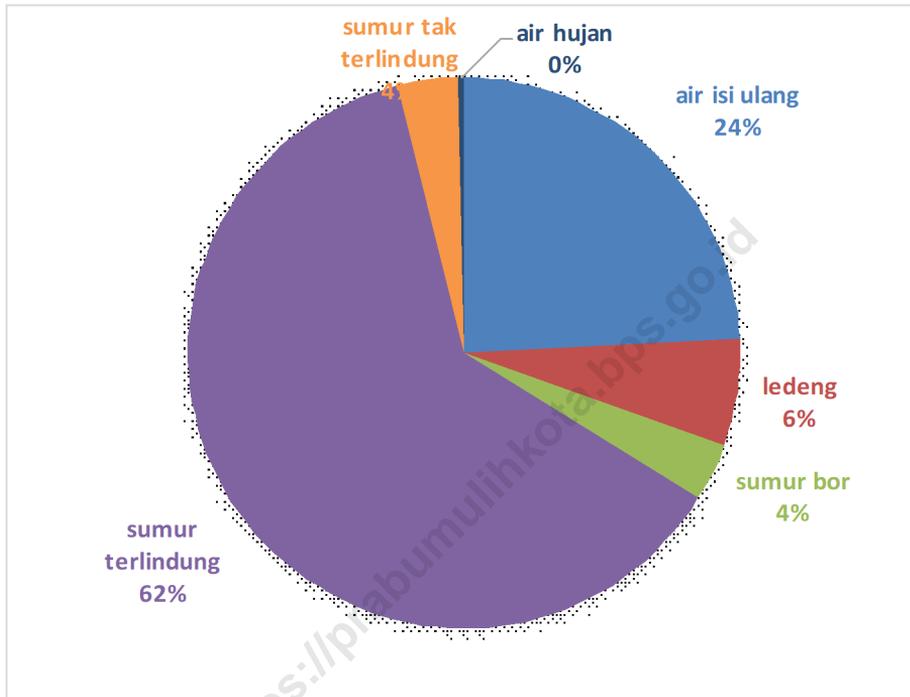
Kualitas kenyamanan rumah tinggal juga bisa diukur berdasarkan tingkat kesehatan dan fasilitas sanitasi. Salah satu ukuran yang digunakan adalah kemudahan untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya. Air yang layak digunakan rumah tangga sebagai sumber air minum maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk.

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator TPB didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam, atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Pada tahun 2018 di Kota Prabumulih sebanyak 45,78 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan meningkat menjadi 95,82 persen di tahun 2019.

Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber air utama yang digunakan untuk minum bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter.

Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk kegiatan minum berasal dari sumur dan mata air terlindung. Proporsinya mencapai 62 persen dan diikuti oleh sumber air kemasan atau isi ulang dan ledeng.

**Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2019**



### **Status Tempat Tinggal**

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Status kepemilikan rumah tinggal sangat dipengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga menengah ke atas akan menempati rumah milik sendiri atau dengan kata lain dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam jangka panjang karena kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sudah terjamin. Selain status kepemilikan rumah tinggal lainnya adalah kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua atau saudara, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah miik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Kota Prabumulih, 2018 dan 2019**

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Jamban sendiri dengan tangki septik & IPAL (%)	96,86	95,63
Akses terhadap air minum layak	45,78	95,82

Sumber: Susenas Maret 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 73,04 persen, sisanya 26,96 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 26,32 persen bebas sewa, kontrak atau sewa dan rumah dinas serta 0,64 persen lainnya.

**Tabel 6. 3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Provinsi Sumatera Selatan, 2018 dan 2019**

<b>Status Kepemilikan Rumah</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Milik Sendiri	75,55	73,04
Kontrak, Sewa, Bebas Sewa, Rumah Dinas	23,15	26,32
Lainnya	1,31	0,64

Sumber: Susenas 2018 dan 2019



11,61 persen Penduduk Prabumulih Berada di Bawah Garis Kemiskinan

BPS Prabumulih, 2019



<https://prabumulihkota.bps.go.id>

## BAB VIII

### KEMISKINAN

Kemiskinan telah menjadi isu kompleks dan multidimensial di seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Ya, kemiskinan bukan hanya sekedar berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi yang berada di bawah standar kesejahteraan terukur (kebutuhan garis kemiskinan), lebih jauh, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Bahkan, kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat, dan karakter bangsa secara luas.

Persoalan kemiskinan menjadi persoalan seluruh negara di dunia sehingga upaya penanggulangannya pun perlu dilakukan dalam konteks global. *Millennium Development Goals (MDGs)* telah berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya, *Sustainable Development Goals (SDG's)* pun masih menempatkan pengentasan kemiskinan (*no poverty*) sebagai tujuan utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk dan dimensi apapun menjadi komitmen seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

#### **Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih**

Persentase penduduk miskin di Kota Prabumulih dalam satu dekade terakhir cenderung menurun meskipun mengalami fluktuasi di beberapa periode waktu. Pada Maret 2009, persentase penduduk miskin sebesar 13,86 persen dan menurun menjadi 11,61 persen di Maret 2019. Dalam periode tersebut terdapat satu kali lonjakan kenaikan persentase kemiskinan yaitu di Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari gejolak ekonomi khususnya di sektor pertanian. Dari segi jumlah, penduduk miskin di Kota Prabumulih sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2010 dan 2015. Namun jumlah penduduk miskin dapat ditekan

hingga mencapai 21,62 ribu pada Maret 2019.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Kota Prabumulih pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.

Berbicara tentang kemiskinan, tentu tidak luput dari garis kemiskinan (GK) sebagai ukuran yang digunakan BPS untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. GK dibentuk dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKSM), GK senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Tahun 2019, GK Kota Prabumulih menjadi Rp 541.648. Keadaan tersebut menggambarkan GK mengalami peningkatan sebesar 2,05 atau sebesar Rp10.900 per kapita per bulan.

**Tabel 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih, 2017-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(5)
2017	20,72	11,42
2018	20,95	11,39
2019	21,62	11,61

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Secara umum, indeks P1 pada periode 2016-2019 berfluktuasi. Indeks P1 cenderung menurun dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar peningkatan sebesar 1,69 di tahun 2018 dan menjadi 1,37 di tahun 2019. Demikian pula dengan indeks P2 yang terus menurun sejalan dengan penurunan indeks P1, yaitu sebesar 0,37 di tahun 2018 menjadi 0,28 di tahun 2019.

Secara umum menurunnya nilai P1 dan P2 tahun 2019 di Kota Prabumulih menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung semakin menurun.

### **Karakteristik Rumah Tangga Miskin Kota Prabumulih**

Permasalahan menarik dalam pembahasan kemiskinan lainnya adalah Karakteristik sosial demografi (penduduk atau rumah tangga miskin), pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dengan adanya Analisis mendalam terhadap permasalahan kemiskinan, diharapkan dapat merepresentasikan keadaan sosial yang sebenarnya sehingga semua pihak yang terkait termasuk pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang tepat untuk program pengentasan kemiskinan.

**Tabel 7.2. Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Prabumulih 2016-2019**

Tahun	Garis	Indeks	Indeks
	Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)		
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	493.871	1,29	0,24
2018	530.748	1,69	0,37
2019	541.648	1,37	0,28

## Karakteristik Pendidikan

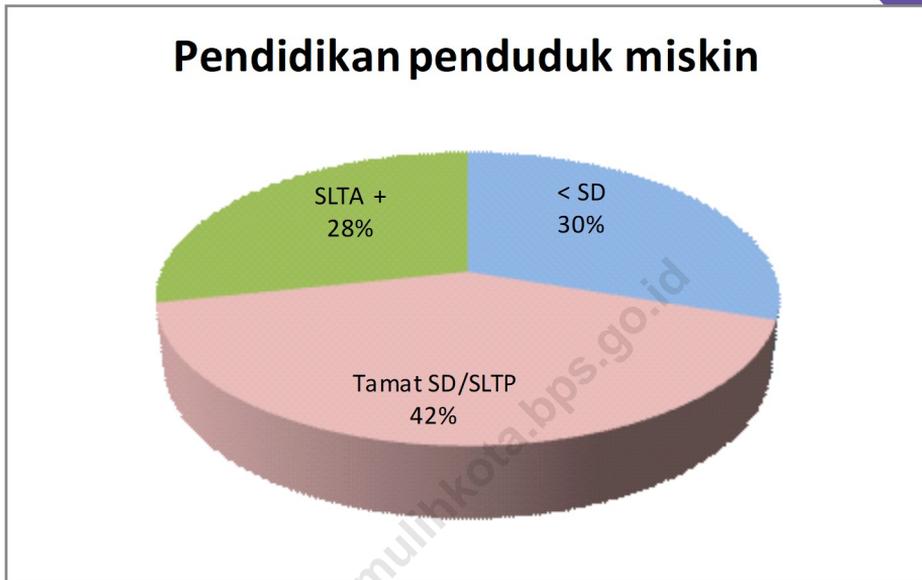
Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas pendidikan serta tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan tingkat pendapatan tinggi. Karakteristik pendidikan KRT seperti kemampuan membaca dan menulis, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pendidikan yang dinilai mampu menggambarkan potret kemiskinan.

Indikator pendidikan yang pertama yaitu kemampuan membaca dan menulis. Persentase angka melek huruf tahun 2019 di Kota Prabumulih sebesar 96,8 persen, berarti dari 10.000 penduduk miskin berusia 15-55 tahun ditemui 320 jiwa yang tidak dapat membaca diperlukan untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini akan menghambat rumah tangga miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan .

Indikator pendidikan yang kedua yaitu jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Pada umumnya, tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk menggambarkan situasi ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SD/SLTP yaitu sebesar 41,43 persen, diikuti tidak tamat SD sebesar 30,20 persen dan tamatan SLTA ke atas sebesar 28.38 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk miskin merupakan tamatan SD dan SLTP. **Kondisi Perumahan**

Penduduk yang sejahtera merupakan penduduk yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani, termasuk dari segi kesehatan. Rumah

**Gambar 7.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2019**



Sumber: Susenas Kor, 2019

yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan akan berdampak langsung terhadap kesehatan penghuninya. Oleh sebab itu, karakteristik perumahan seperti sumber air minum dan kepemilikan jamban sendiri menarik untuk dikaitkan dengan rumah tangga miskin.

Ketersediaan fasilitas air layak sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga merupakan indikator perumahan yang juga dapat mencirikan sehat atau tidaknya suatu rumah. Air layak dalam uraian berikutnya didefinisikan air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran, ledeng eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter.

Dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan air layak tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang telah menikmati ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum tercatat sebesar 48,23 persen di tahun 2019. Indikasi tersebut menguatkan dugaan bahwa rumah tangga miskin masih memiliki keterbatasan dalam ketersediaan air bersih sebagai salah satu fasilitas penting kategori rumah sehat.

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang sangat penting dalam mendukung pola hidup sehat. Di samping ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, jamban umum/tidak ada. Distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas jamban tampak bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri tercatat sebesar 92,41 persen di tahun 2019. Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri mencerminkan semakin tinggi kesadaran rumah tangga miskin akan kesehatan serta menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga miskin.

**Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama, 2019**

Tahun	Air Layak	Jamban Sendiri/bersama
(1)	(2)	(5)
2019	48,23	92,41

Sumber: Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2019



**51,98** persen penduduk Prabumulih telah mengakses internet

BPS Prabumulih, 2019

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Akses informasi dan komunikasi melalui internet dan *smartphone* menjadi “candu” baru dan menyebabkan pergeseran gaya hidup sebagian besar masyarakat.

Perkembangan dunia digital mampu menciptakan kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomian. Akses yang cepat dan mudah juga menciptakan ruang dan peluang yang lebih luas bagi setiap wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatifnya. Hal tersebut tentu saja memiliki imbas terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Kemajuan perekonomian yang dialami Kota Prabumulih seharusnya berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Selain dari indikator social strategis seperti kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan, indikator sosial lainnya pun tak luput dari dampak ekonomi yang ada.

### **Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Salah satu tantangan sekaligus peluang di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang menunjang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Hal ini karena potensi TIK jika dikembangkan secara tepat dan optimal, akan memberikan dampak positif yang cepat dan signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah. Kemajuan tersebut tidak hanya dari aspek ekonomi melainkan berdampak pula pada pembangunan masyarakat.

Saat ini dengan perkembangan TIK, masyarakat secara umum men dapat berbagai kemudahan. Aplikasi berbasis online memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk aktif berperan dalam perekonomian sebagai subjek maupun objek. Terbukanya lapangan kerja baru dan

industri kreatif menciptakan sebuah pasar tersendiri bagi kalangan pelaku usaha. Semakin banyak penduduk yang mampu mengakses TIK maka dipastikan peluang mendapat kesejahteraan yang lebih baik semakin terbuka.

Di Prabumulih, perkembangan TIK telah mulai dirasakan masyarakat. Setiap tahunnya terdapat peningkatan akses masyarakat terhadap TIK. Pada tahun 2019, sekitar 51,98 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas di Prabumulih yang mengakses internet. Jumlah ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 42,4 persen tahun 2018.

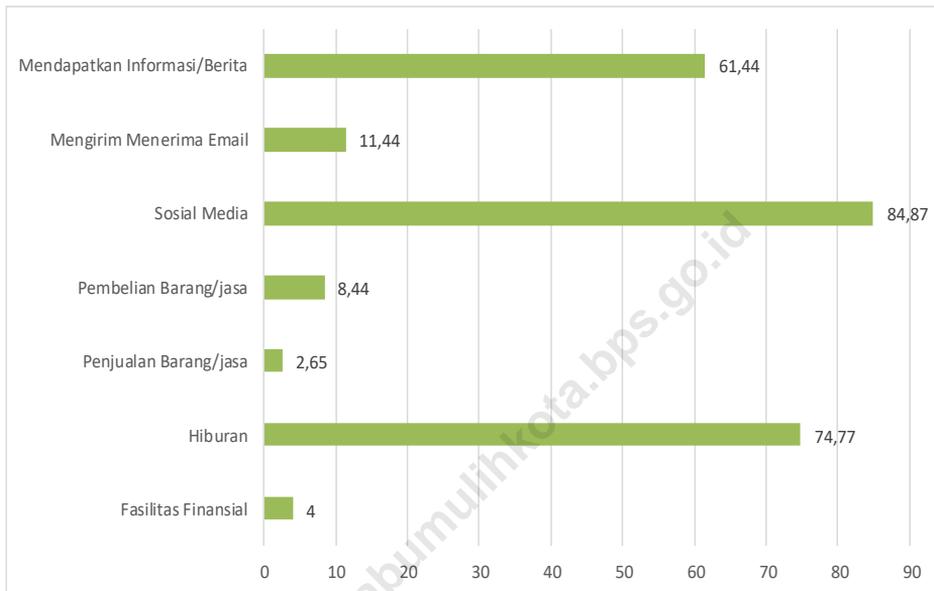
Gambar 8.1 Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet, 2018 -2019



Sumber : Susenas, 2018 dan 2019

Kebanyakan masyarakat mengakses internet untuk sosial media. Di Prabumulih sebanyak 84,87 persen masyarakat mengakses internet untuk media social. Perdagangan online yang sedang marak saat ini ternyata juga telah menjangkau masyarakat di

**Gambar 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan**



Sumber : Susenas, 2019

Prabumulih. Pada tahun 2019, sekitar 8,44 persen masyarakat mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa dan 2,65 persen mengakses internet untuk penjualan barang dan jasa. Hal yang menarik adalah masih rendahnya pemanfaatan internet dalam melakukan kegiatan jual/beli online di Prabumulih. Padahal, jual/beli online dewasa ini telah menjadi cara baru dalam meningkatkan pasar.

Sementara itu, penggunaan internet untuk fasilitas finansial/banking yang juga masih rendah. Hanya 4 persen masyarakat mengakses internet untuk fasilitas finansial.

Sebagai Kota yang menunjang ibu kota provinsi, Kota Prabumulih yang merupakan pusat aktivitas bisnis dan pemerintahan di Sumatera Selatan memiliki persentase penduduk paling banyak dalam hal akses terhadap komputer dan internet. Pada tahun 2019, sebanyak 20,02 per-

sen atau seperlima penduduk Kota Palembang menggunakan komputer sementara itu 57,13 persen atau lebih dari separuh penduduk Kota Palembang telah mengakses internet. Hal ini tentunya menunjukkan kesiapan warga Kota Palembang dalam menyongsong era digitalisasi saat ini. Harapannya, akses internet akan terus berkembang berkembang di wilayah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan, sehingga dampak positif perkembangan TIK dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

- \_\_\_\_\_2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kota Prabumulih
- \_\_\_\_\_2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kota Prabumulih
- \_\_\_\_\_2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Kota Prabumulih
- \_\_\_\_\_2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- \_\_\_\_\_2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- \_\_\_\_\_2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- \_\_\_\_\_2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- \_\_\_\_\_2015. Statistik Kesejahteraan Rakyat. BPS Provinsi Sumatera Selatan
- \_\_\_\_\_2020. Prabumulih Dalam Angka. BPS Kota Prabumulih
- \_\_\_\_\_2019. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- \_\_\_\_\_2018. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- \_\_\_\_\_2017. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- \_\_\_\_\_2016. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- \_\_\_\_\_2015. Ikhtisar data Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://prabumulihkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PRABUMULIH**

Jl. Jendral Sudirman No. 60. Komp. Pemkot Prabumulih, Prabumulih 31142  
Telp : (0713) 3920031  
Homepage : <http://prabumulihkota.bps.go.id>